

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM “5 UNTUNG” PEMUTIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG TAHUN 2023

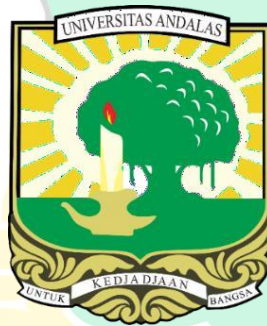
UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik*

Oleh:

ZIFA INDAH PRATIWI

BP: 1910832037



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

UNTUK

2024

BANGSA

ABSTRAK

Proses Implementasi Kebijakan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang pada tahun 2023 menghadirkan serangkaian insentif bagi masyarakat. Program ini yang terdapat pada SK Gubernur Nomor 903 – 608 – 2023 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administrasi menawarkan penghapusan denda pajak, pengurangan pokok pajak, pengurangan pokok pajak, pembebasan sanksi administrasi keterlambatan membayar pajak, dan manfaat lainnya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam membantu menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle yang terdapat dua indikator besar, pertama Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang terdiri dari (1) target sasaran dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh sasaran; (3) perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) ketepatan letak kebijakan; (5) implementor kebijakan; dan (6) sumber daya yang memadai dalam kebijakan. Kedua indikator lingkungan implementasi (*context of implementation*) terdiri dari (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) responsivitas kelompok sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan program 5 untung pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang pada Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan yang peneliti dapatkan ialah implementasi kebijakan Program 5 Untung di Kota Padang menunjukkan hasil yang kurang baik, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki, khususnya dalam responsivitas masyarakat yang rendah, isi kebijakan yang kurang tepat sehingga tidak meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang tahun 2023.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor



ABSTRACT

The process of implementing the 5 Benefits Motor Vehicle Tax Reduction Program Policy by the Regional Government of West Sumatra Province in the City of Padang in 2023 presents a series of incentives for the community. This program offers elimination of tax fines, reduction of principal tax, reduction of principal tax, exemption from administrative sanctions for late paying taxes, and other benefits to encourage taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. To help answer this problem, researchers used Merilee S Grindle's Policy Implementation theory, which contains two major indicators, first, Policy Content, which consists of (1) targets in the policy content; (2) the type of benefits received by the target; (3) the desired change in a policy; (4) accuracy of policy location; (5) policy implementer; and (6) adequate resources in policy. The two indicators of the implementation environment (context of implementation) consist of (1) the power, interests and strategies possessed by the actors involved in implementing the policy; (2) characteristics of the institutions and regime in power; (3) target group responsiveness. This research aims to explain the implementation of the 5 benefits program policy for reducing motor vehicle tax by the Regional Government of West Sumatra Province in the City of Padang in 2023. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The findings that the researchers obtained were that the implementation of the 5 Profits Program policy in the City of Padang showed quite positive results, although there were still several obstacles that needed to be corrected, especially in low community responsiveness, inappropriate policy content so that it did not increase the level of taxpayer compliance in the City Padang in 2023.

Keywords : Policy, Motor Vehicle Tax Reduction

